

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Menjelang perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017, Mata Najwa mengundang para kandidatnya dalam tiga episode berbeda untuk memperbincangkan kesiapan mereka dalam memimpin Jakarta. Tiga episode tersebut adalah *Petarung Ibu Kota*, *Merayu Jakarta*, & *Bertaruh di Jakarta*. Banyak isu yang muncul dalam episode-episode tersebut namun yang menonjol dalam ketiganya adalah bagaimana pandangan Mata Najwa tentang “Gubernur Ideal untuk DKI Jakarta”. Isu-isu yang dibahas kebanyakan mengenai bagaimana persiapan Pilkada DKI Jakarta dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanding, namun demikian, pandangan bahwa Gubernur DKI Jakarta harus memenuhi kriteria tertentu senantiasa tersirat dalam dialog-dialog tertentu. Peneliti membatasi fokus hanya kepada dialog yang memperlihatkan/mewakili penceritaan wacana “Gubernur Ideal untuk DKI Jakarta”.

Analisis yang akan dilakukan adalah analisis wacana kritis model Teun A Van Dijk yang mengedepankan analisis dalam tiga dimensi yakni dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Penyajian analisis wacana dalam bab ini tidak akan dilakukan secara terbagi dari masing-masing dimensi. Analisis akan dijabarkan secara runtut sesuai hal-hal pembentuk wacana “Gubernur Ideal untuk Jakarta” yang ditemukan dari tiga episode Mata Najwa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Pembahasan teks, kognisi sosial, dan konteks sosial akan dipadukan sesuai dengan temuan-temuan tersebut. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperlihatkan benang merah dari wacana “Gubernur Ideal untuk DKI Jakarta”

yang dimunculkan Mata Najwa. Adapun temuan yang peneliti dapatkan dari tiga episode tersebut adalah:

1. Dukungan Partai Politik sebagai Representasi Kualitas Gubernur
2. Gubernur Ideal didasari oleh Platform dan Rekam Jejak yang Baik



Dua poin di atas akan dianalisis berdasarkan teks yang terkandung dalam tiga episode Mata Najwa menjelang Pilkada DKI Jakarta, kognisi sosial produsen teks dan juga konteks sosial yang mempengaruhi penceritaan tentang kriteria gubernur ideal. Ketiga dimensi yang akan dianalisis adalah yang memiliki hubungan dengan wacana Gubernur Ideal untuk DKI Jakarta yang merupakan fokus dari penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bahwa wacana Gubernur Ideal untuk DKI Jakarta digulirkan oleh Mata Najwa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mengedepankan kriteria-kriteria tertentu seperti pentingnya karakter seseorang, rekam jejak yang baik dalam pemerintahan, dan juga dukungan yang konkret dari partai politik pengusung merupakan tolak ukur apakah seorang tersebut akan menjadi gubernur yang ideal atau tidak untuk DKI Jakarta. Berikut penjabaran analisis dari dua poin fokus yang ditemukan dalam Mata Najwa Petarung Ibu Kota, Merayu Jakarta, dan Bertaruh di Jakarta.

#### **A. Dukungan Partai Politik sebagai Representasi Kualitas Gubernur**

Menjelang penetapan Pasangan Calon Pilkada DKI Jakarta 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016, Najwa Shihab mengundang para kandidat untuk diwawancarai seputar isu-isu tertentu. Salah satu isu yang penting adalah bagaimana proses atau dinamika para partai politik dalam mendukung mereka sehingga kuat untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil

gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Mata Najwa menceritakan dinamika partai politik dalam mengusung para calon. Lebih fokus lagi, Mata Najwa juga memperlihatkan bagaimana proses terbentuknya dukungan, bentuk dukungan, dan juga membongkar kualitas dari kandidat yang didukung oleh partai-partai politik yang ada.

**Tabel 3.1**  
**Percakapan Najwa dan Djarot tentang Suksesnya Ahok-Djarot Lewati Dinamika Demokrasi**

Waktu	Visual	Teks
<b>Segmen 1</b> 06:09- 06:18		<p>(Line 7) Jadi teman-teman petinggi partai, ada Mas Hasto, kemudian kita ingat ada beberapa nama yang kencang bilang ada yang mau Risma, ada yang bilang tidak suka Pak Ahok dan sebagainya, itu hanya drama pura-pura saja ya?</p>
06:19- 07:31		<p>(Line 8) [Djarot Saiful H: Bukan, itulah satu sistem demokrasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Di dalam sistem demokrasi kita itu biasa ada bagian-bagian yang masuk dalam Rodinda, ada romantikanya, ada dinamikanya, ada dialektikanya. Boleh, berbeda pendapat] (Najwa memotong) Berarti drama... Romantika, dialektika, itu drama politik. Mengelabui rakyat itu pak. [Tidak] Buang-buang waktu kita menunggu PDI Perjuangan ternyata akhirnya Ahok-Djarot Juga, sudah lelah kita pak. [Djarot Saiful H: Oh tidak. Biarkan saja di situ, biarkan begitu. Sepanjang, sepanjang, itu tidak keluar dari satu pakem keputusan. Dan teman-teman di DPP, DPD, DPC itu bisa mengetahui bahwa ketua umum itu menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga kami itu mempunyai yang namanya hak prerogatif. DPD, DPC, sampai dengan tingkat PAC sudah diberikan porsi untuk mengajukan nama-nama calon yang diusulkan oleh struktur partai.]</p>

Pada line 7, Najwa Shihab coba membuka fakta langsung dari sumber peristiwa dinamika politik Ahok-Djarot yaitu Djarot sendiri terkait bagaimana mungkin Ahok yang sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh PDI-P kini dengan begitu eratnya dapat bergandengan tangan. Terpantik dengan kata ‘drama’ dan ‘pura-pura’, lantas Djarot pada line 8 menjawab panjang lebar menggambarkan betapa itu merupakan proses demokrasi yang wajar terjadi. Bahwasannya romantika, dinamika dan dialektika dalam berpolitik adalah hal yang menunjukkan bahwa demokrasi berjalan secara sehat. Djarot juga menekankan bahwa keputusan penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon gubernur dari PDI-P adalah hak prerogatif dari ketua umum, Megawati Soekarnopoetri, yang mana ini menunjukkan kalau Ahok adalah sosok yang sangat layak untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Hak prerogatif adalah hak khusus yang dimiliki untuk menentukan/memutuskan apapun oleh orang yang berkuasa tanpa dapat diawasi dan dinafikan oleh pihak lain, termasuk undang-undang tertulis. Menurut Dicey (dalam Susanto, 2014), hak prerogatif merupakan residu dari kewenangan diskresi oleh raja dan ratu pada masa Kerajaan Inggris lama yang mana kewenangan tersebut tidak berdasar undang-undang namun sebatas *common law* yang berlaku. Dalam konteks hak prerogatif ketua umum partai, dalam kasus ini hak prerogatif milik Megawati Soekarnopoetri, hak ini membuat ketua umum dapat memutuskan apapun termasuk penunjukan calon kepala daerah yang akan diusung dalam pilkada. Adapun sebagai ketua umum partai politik, keputusannya sudah pasti dipatuhi dan diperjuangkan secara mutlak oleh perangkat dan anggota partainya.

**Tabel 3.2**  
**Teks Percakapan Djarot & Najwa menunjukkan Kekuatan Dukungan PDI-P**

Waktu	Teks
<b>Segmen 2</b>	<b>Djarot Syaiful H (Narasumber, Bakal Cawagub DKI Jakarta)</b>
00:28- 01:05	(Line 18) Kita punya pengalaman tahun 2012, ketika di menit-menit terakhir akhirnya Ibu Mega memutuskan Pak Jokowi-Pak Basuki. Padahal sebagian besar waktu itu, itu yakin betul bahwa yang nanti akan dapat rekom itu adalah Pak Foke, incumbent waktu itu, ya, dan itu sudah masif juga terjadi. Tapi ketika keputusan sudah diambil, bahwa kita harus total untuk memenangkan Pak Jokowi-Pak Basuki, langsung mereka bersatu.
	<b>Najwa Shihab (Host)</b>
01:06- 01:17	(Line 19) Tapi ketika itu tidak ada suara-suara negatif terhadap calon incumbent, tidak seperti kemarin, banyak sekali suara negatif ke, ditujukan kepada Pak Ahok, pasangan anda sekarang, yang datang dari PDI Perjuangan, dari petinggi partainya.
	<b>Djarot Syaiful H (Narasumber, Bakal cawagub DKI Jakarta)</b>
01:17- 02:57	(Line 20) Ya, ya. Suara negatif yang paling dicermati, yang membikin teman-teman ini agak terluka adalah ketika pilihan jalur perseorangan itu dan ketika ada kesan untuk mendegradasikan keberadaan partai politik. Ini kalau menurut kita, menurut teman-teman, ini sangat tidak mendidik. Padahal tujuan kita adalah membangun <b>[Najwa memotong: Jadi luka itu sudah sembuh sekarang? Ketika Bu Mega bilang “Ahok-Djarot!” (Najwa menggerakkan tangan seperti mengetuk palu hakim, kemudian beri gestur sapuan tangan) sudah hilang semua luka?]</b> Tidak bisa kita bisa bilang seperti itu. Dengan justru seperti inilah kita melakukan konsolidasi lagi. Tadi pagi langsung dilakukan konsolidasi untuk menyampaikan keputusan DPW partai kepada seluruh pengurus partai mulai dari tingkat pengurus DPC, PAC, sampai dengan ranting secara serentak di lima wilayah untuk bisa menjelaskan persoalan seperti ini. Sebentar lagi kita juga akan sampai turun ke tingkat anak ranting. Kepengurusan kita sampai dengan tingkat anak ranting saja, anak ranting saja itu ada 28.000 orang, ya, kalau semuanya itu kalau dikumpulkan, bisa sampai 40.000 orang. Kemarin sudah, eh, tadi sudah bergerak seperti ini. Tentu saja akan kita jelaskan alasan-alasan mengapa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarnoputri sampai menggunakan hak prerogratifnya untuk mengajukan pasangan Ahok-Djarot.
<b>[01:46- 01:51]</b>	

Berangkat dari istimewanya sebuah hak prerogatif yang dimiliki Megawati Soekarnopoetri, Djarot menceritakan dengan menggebu-gebu bahwa dukungan partai politik yang merupakan keluaran dari hak khusus yang digunakan secara istimewa tersebut adalah dukungan yang penuh dengan militansi dan kekuatan. Ia bahkan mengingatkan khalayak bahwasannya kemenangan Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012 merupakan hasil dari keputusan yang diambil oleh Megawati Soekarnopoetri saat itu menggunakan hak prerogatifnya sebagai Ketua PDI-P. Dengan fakta ini, Djarot ingin membuktikan bahwa dukungan dari partai politik, terutama apabila menggunakan hak prerogatif, dapat berpengaruh besar terhadap tingkat kemenangan dan kualitas dari gubernur tersebut.

Pada line 20, Djarot sampaikan panjang lebar terkait aksi nyata yang dilakukan segenap perangkat partai untuk menindaklanjuti keputusan dari ketua umum mereka. PDI-P ketika mendapat mandat langsung dari Megawati akan segera bersatu membangun kekuatan dengan konsolidasi secara vertikal sampai ke akar rumput. Kalimat dari Djarot ini “Sebentar lagi kita juga akan sampai turun ke tingkat anak ranting. Kepengurusan kita sampai dengan tingkat anak ranting saja, anak ranting saja itu ada 28.000 orang, ya, kalau semuanya itu kalau dikumpulkan, bisa sampai 40.000 orang” merupakan bentuk kalimat yang menyiratkan bahwa konsolidasi yang kuat adalah pondasi partai politik untuk menciptakan gubernur yang kuat juga. Koheren dengan kalimat pada line 18, Djarot menyiratkan bahwa konsolidasi ini ingin mengulang sukses sebagaimana telah dilakukan PDI-P saat membentuk Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Konsolidasi partai politik dilakukan sebagai bentuk persatuan pandangan dan tindakan dari partai tersebut sehingga kemudian timbul soliditas dalam melaksanakan agenda-agenda politik. Tidak ragu Djarot menyebutkan jumlah anak ranting PDI-P untuk memberi kesan kuat pada dukungan PDI-P sendiri untuk seorang calon gubernur. Ini masih sebatas dukungan PDI-P di luar dari kekuatan yang dimiliki partai politik pengusung lain. Dengan gambaran ini, muncul wacana dukungan partai politik senada dengan kekuatan gubernur yang diusung. Tentu saja dalam berdemokrasi, banyaknya masyarakat yang mendukung memperbesar kemungkinan bahwa gubernur yang didukung merupakan sosok yang berkualitas. Kesan inilah yang ingin ditunjukkan oleh Djarot Saiful Hidayat ketika menjawab pertanyaan Najwa Shihab.

Teks yang tercipta dari pertanyaan Najwa kepada Djarot ini didasari dari pengalaman PDI-P pada Pilkada DKI Jakarta 2012 kala mereka mengusung Jokowi-Ahok. Terlepas dari jumlah parpol yang mendukung, soliditas dari partai politik itu sendiri lebih penting untuk menggaet simpati masyarakat. Tentu soliditas mesin partai juga menambah daya gedor gubernur untuk mempersiapkan kemenangan dengan strategi yang baik. Konteksnya, pada Pilkada DKI Jakarta 2012 silam, PDI-P mendukung Jokowi-Ahok hanya bersama Partai Gerindra, namun soliditas kedua partai tersebut berhasil menarik perhatian warga dan suara mereka untuk memilih Jokowi-Ahok. Berdasar pengalaman tersebut, dukungan partai politik kepada Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini terlihat merepresentasikan kekuatan besar baik dari sisi jumlah, dan soliditas mesin partainya.

Terkait dengan soliditas dukungan partai sebagai gambaran baik dan siapnya seseorang menjadi gubernur, terdapat penceritaan dalam Mata Najwa episode Petarung Ibu Kota juga bahwasannya ketika partai terpecah, sulit untuk menghadirkan sosok gubernur yang berkualitas. Kesan ini disampaikan secara lugas oleh Mata Najwa dengan menggulirkan fakta-fakta ‘perpecahan’ partai Koalisi Kekeluargaan di DKI Jakarta, dan pertanyaan-pertanyaan seputar kesiapan mereka dalam mengusung kandidat cagub-cawagub masing-masing.

**Tabel 3.3**  
**Penggambaran Tidak Solidnya Dukungan Partai mengakibatkan Tidak Jelasnya Kualitas Pasangan Calon yang didukung**

Waktu	Visual	Teks
<b>Segmen 3</b> 08:11-08:46		<b>Najwa Shihab</b> <i>(Line 45)</i> Yang jelas sebelumnya sempat ada deklarasi Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera dari PKS. Kita akan lihat cuplikan deklarasi itu dan apa tanggapan parpol lain yang kecewa dengan deklarasi itu.
08:49-09:05		<b>Tayangan Deklarasi dan Tanggapan Parpol</b> <b>Syarifudin Hasan (Waketum Partai Demokrat)</b> <i>(Line 46)</i> Mereka memutuskan itu antara mereka dengan saja, antara PKS dengan Gerindra. Jadi memang Demokrat tidak terlibat di situ. Demokrat menginginkan agar yang diusung itu ya harus sama-sama.
09:06-09:33		<b>Hasbiallah Ilyas (Ketua DPW PKB)</b> <i>(line 47)</i> Munculnya nama Pak Mardani tidak pernah dikomunikasikan dengan PKB. PKB ini salah satu koalisi yang akan mengusung Pak Sandi. Bahkan dari awal PKB sudah, dari sebelum Ramadhan itu PKB sudah berjalan dengan Pak Sandi, Pak Sandi dengan Pak



		Syaifullah. Tiba-tiba PKS mengambil keputusan sendiri tanpa komunikasi dengan kita.
--	--	---

Pada tabel 3.3 di atas, Najwa Shihab sembari mewawancarai Sandiaga Uno, salah satu kandidat yang dijagokan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta saat itu, mengungkapkan fakta bahwa PKS telah menetapkan calon wakil gubernur untuk mendampingi Sandi yakni Mardani Ali Sera secara sepihak. Bahkan Mata Najwa menampilkan headline pemberitaan bahwa pasangan Sandi-Mardani sudah pakem dan tidak dapat diubah lagi. Dengan mengungkapkan fakta tersebut, diperlihatkan bahwa bentuk/cara dukungan partai politik memperlihatkan kualitas kandidat yang diusung. Sandiaga Uno saat itu masih sangat rendah keterpilihannya dibanding Ahok-Djarot. Menurut data dari Poltracking yang disampaikan oleh Hanta Yudha, bahkan gabungan Yusril Ihza Mahendra-Sandiaga Uno hanya sebesar 28,46% dibanding Ahok-Djarot sebesar 44,62%. Kemudian simulasi gabungan Sandi-Syaifullah hanya mendapat keterpilihan sebesar 27,18% dibanding Ahok-Djarot 41,54%. Konteksnya, seorang Sandiaga tidak memiliki kualitas dalam menarik simpati masyarakat dan menjadi Gubernur Jakarta, termasuk apabila disandingkan dengan Mardani Ali Sera yang hanya diusung oleh PKS dalam waktu yang tiba-tiba.

Kembali ke permasalahan dukungan partai politik merupakan gambaran kualitas gubernur, Najwa kemudian menayangkan pernyataan bantahan dari partai Koalisi Kekeluargaan lainnya yakni dari Partai demokrat dan PKB. Masing-masing merupakan tayangan wawancara bahwasannya tidak ada komunikasi yang


baik antara PKS, Partai Demokrat, dan PKB mengenai penentuan Mardani Ali Sera sebagai calon wakil gubernur mendampingi Sandiaga. Pada line 46 Syarifudin Hasan menegaskan bahwa keputusan Sandi-Mardani merupakan keputusan sepihak antara Partai Gerindra dan PKS, dan Partai Demokrat menginginkan konsolidasi utuh antara partai politik Koalisi Kekeluargaan ketika hendak mengusung pasangan calon. Hasbiallah Ilyas pada line 47 mengatakan bahwa PKB merupakan pendukung awal Sandiaga-Syaifullah, namun PKS dan Gerindra sama sekali tidak melakukan komunikasi tentang penunjukkan Mardani Ali Sera. Dengan menampilkan pernyataan Hasbi ini, Mata Najwa menggulirkan bahwasannya partai Koalisi Kekeluargaan tengah terpecah sehingga dukungannya terhadap siapapun akan kecil imbasnya atau bahkan tidak dapat dijadikan pilihan bagi masyarakat.

Adapun penggunaan visualisasi pada line 46 dan 47 adalah untuk menunjukkan ekspresi verbal sekaligus non verbal dari masing-masing petinggi parpol yakni Syarif Hasan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang mana ia mewakili Partai Kepala Koalisi Kekeluargaan dan Hasbiallah Ilyas sebagai Ketua DPW PKB DKI Jakarta yang mana kadernya, Syaifullah, sudah disepakati sebelumnya sebagai pendamping Sandiaga Uno. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa mereka menunjukkan kekecewaan secara verbal, nampak sekali ekspresi kaget, dan kecewa akan penunjukan sepihak Sandi-Mardani sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini. Mata Najwa memperlihatkan mulai adanya keretakan dari partai politik dalam Koalisi

kekeluargaan, yang tentunya berimbas pada lemahnya dukungan yang dapat mereka berikan bagi siapapun kelak yang menjadi kandidat mereka.

Bentuk kekuatan dukungan partai-partai politik dalam koalisi kekeluargaan senantiasa digali oleh Najwa Shihab pada Mata Najwa episode Petarung Ibu Kota. Salah satunya adalah dengan mencermati pertemuan yang tengah terjadi di Cikeas antara partai-partai politik Koalisi kekeluargaan terkecuali Partai Gerindra dan PKS. Berikut percakapan yang patut dicermati terkait wacana dukungan parpol sebagai indikator kualitas gubernur.

**Tabel 3.4**  
**Dialog Najwa Shihab Menanyakan Kesiapan Partai Anggota Koalisi Kekeluargaan**  
**Menjelang Tengat Pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta**

Waktu	Visual	Teks
<b>Segmen 5</b>  02:36- 03:10		<p><b>Syarief Hasan (Waketum Partai Demokrat)</b>  <i>(line 66)</i> Belum tentu. Karena kita akan sosialisasikan dengan partai-partai kekeluargaan yang lain dan tentunya kami minta pandangan-pandangan dari mereka apakah ini yang berpotensi untuk memenangkan Pilkada DKI atau bagaimana. Semua itu kami tampung dan kita akan satukan satu persepsi dan satu kesepakatan di antara koalisi kekeluargaan. Harapannya tentunya adalah kita memenangkan Pilkada DKI.</p>
03:11- 03:25		<p><b>Najwa Shihab</b>  <i>(Line 67)</i> Ok, yang jelas apakah anda bisa pastikan ke kami malam ini akan keluar nama atau malam ini akan tidur lagi kemudian dibahas besok baru kemudian hari Jumat, hari terakhir baru akan keluar nama, Pak Syarief? Awas ketinggalan kereta lho pak.</p>
03:26-		

03:41		<p><b>Syarief Hasan</b>  <i>(Line 68)</i> Kita masih memiliki waktu, ya, memiliki waktu. Kalau memang malam ini kita dapatkan satu nama, mungkin besok kita mantapkan lagi. Dan pada saatnya kita akan mendaftarkan ya tentunya sesuai dengan jadwal KPU.</p>
-------	--	---

Najwa Shihab mengikuti perkembangan konsolidasi partai-partai Koalisi Kekeluargaan yang dikepalai langsung oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dilakukan oleh Najwa Shihab dengan mewawancarai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarifudin Hasan langsung dari Cikeas secara *facetime*. Cukup intens ditampilkan pembahasan tentang konsolidasi koalisi tersebut, namun yang menjadi penegasan Najwa adalah kapan ‘nama’ kandidat yang akan diusung keluar dan resmi didaftarkan ke KPUD DKI Jakarta.

Kegamangan dan keterlambatan tindakan politik dari Koalisi Kekeluargaan tersirat dari perkataan Syarif Hasan pada line 66. Ketika Koalisi PDI-P, Hanura, Nasdem, dan Golkar telah mantap mendukung Ahok-Djarot, namun Koalisi Kekeluargaan masih dalam rangka sosialisasi penggodokan nama dan potensi kemenangan. Meski tidak tahu apa yang terjadi di internal koalisi, namun yang terlihat dari perkataan Syarif Hasan merupakan sebuah bentuk ketidaksiapan dukungan dari partai politik kepada pihak yang juga belum siap. Namun demikian, berbeda dengan yang dikemas Mata Najwa, Syarif Hasan menegaskan bahwa segala keputusan yang akan diambil adalah hasil dari buah pemikiran seluruh partai politik anggota koalisi kekeluargaan. Syarif mengekspresikan hal tersebut dengan istilah ‘satu persepsi’ dan ‘satu kesepakatan’, membuktikan bahwa hasil apapun yang diambil, tidak semata-mata keputusan kosong,

melainkan hasil dari kesamaan pandangan dari masing-masing partai politik Koalisi Kekeluargaan yakni Partai Demokrat, PAN, PKB, PPP, PKS, dan Partai Gerindra.

Menggali detail ketidaksiapan yang tersirat dari perkataan Syarief Hasan, Najwa lantas menanyakan apakah hari itu juga akan langsung keluar nama, atau masih akan menunda pembahasan esok hari baru diputuskan. Najwa bahkan menyentil dengan kalimat ‘awas ketinggalan kereta lho pak’ sekaligus memperlihatkan ancaman tidak bisanya Koalisi Kekeluargaan mengukung kandidatnya sendiri. Apa yang dilakukan Najwa Shihab merupakan penggalian detail informasi untuk memperlihatkan lebih jauh bagaimana kesiapan Koalisi Kekeluargaan dalam mendukung sosok Calon Gubernur DKI Jakarta. Kemudian tampak pada jawaban Syarief Hasan di line 68 bahwa Koalisi Kekeluargaan akan mendaftar sesuai dengan jadwal KPU. Fakta ini menandakan bahwa dukungan yang datang dari koalisi ini adalah dukungan dadakan yang kesannya seperti terburu-buru dalam mendukung kandidatnya.

**Tabel 3.5**  
**Teks Tanggapan Viktor Laiskodat Terkait Kesiapan Koalisi Kekeluargaan dalam Mengukung Kandidat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur**

Waktu	Visual	Teks
<b>Segmen 6</b>  01:39- 02:48		<b>Viktor Laiskodat (Ketua DPP Partai Nasdem)</b>  <i>(Line 76)</i> Yang pertama memang, lihat bagaimana rapat di Cikeas, melihat bagaimana seorang presiden ke 6 turun gunung untuk membuat pertemuan itu bisa berjalan baik, ada dua hal yang saya, pertama, di sana punya problem karena masih bicara tentang mencari orang yang

		<p>punya kemampuan elektabilitasnya akan mampu melawan Ahok, itu yang pertama. Jadi masih mampu untuk mencari siapa yang akan mampu memenangkan ini, ini problemnya. Problem yang kedua, mereka belum sepakat mengikatkan diri dalam suatu koalisi [Najwa: Sudah ada koalisi kekeluargaan] Sampai hari ini kan namanya saja, buktinya PDIP saja pecah. PDIP kan dulu juga deklarasinya sebagai koalisi kekeluargaan lalu hari ini pindah dukung Ahok. Menunjukkan bahwa dulu pernah ada. Dan sekarang kita lihat, kalau dua hal ini menjadi ukuran, saya tidak yakin dalam waktu dua hari ini, siapapun dicalonkan, akan sangat susah melawan Ahok-Djarot, karena waktu untuk mempertemukan itu agak susah.</p>
--	--	---

Terkait keterburu-buruan ini, Najwa Shihab mempersilahkan Viktor Laiskodat, Ketua DPP Partai Nasdem, untuk menyampaikan tanggapannya terkait pertemuan yang tengah terjadi antara patia-partai politik dalam Koalisi kekeluargaan di Cikeas saat itu, Rabu, 21 September 2016. Viktor menggunakan istilah ‘Presiden ke 6 turun gunung’ karena pertemuan itu sampai melibatkan sosok SBY. Istilah tersebut menyiratkan bahwa konsolidasi tersebut merupakan konsolidasi darurat dan dilakukan secara panik. Ia menambahkan bahwa Koalisi Kekeluargaan tengah terpecah dan mereka masih dalam tahap menimbang nama namun belum ke tahap menyuguhkan kualitas yang baik. Apa yang dikatakan Viktor menjadi sebuah teks tersendiri yang memperlihatkan bahwa konsolidasi yang terburu-buru dan dilakukan secara terpecah, tidak akan bisa menghasilkan dukungan konkret kepada sosok yang kuat dan berkualitas untuk menjadi

Gubernur DKI Jakarta menyaingi Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Mata Najwa menggambarkan bahwa dukungan partai politik sangat krusial dalam membentuk sosok gubernur yang ideal dan berkualitas. Dari apa yang disampaikan Viktor Laiskodat bahwa sulit untuk menemukan sosok yang dapat melawan Ahok-Djarot dalam waktu yang singkat dan dengan dukungan yang lemah, dapat ditarik kesimpulan bahwa PDI-P, Nasdem, Golkar, dan Hanura merupakan partai politik yang solid, dengan dukungan yang kuat dengan yakin mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Konteksnya, masyarakat Jakarta pada saat itu masih berharap banyak kepada Ahok dikarenakan pencapaian yang ia raih merupakan prestasi yang berimbas bagi kehidupan di Jakarta.

Setelah memperlihatkan lemah dan tidak solidnya Koalisi Kekeluargaan yang akhirnya terbukti pecah karena pada 23 september 2016 kemarin mendaftarkan dua nama yang berbeda secara tiba-tiba, Mata Najwa kemudian memperlihatkan kualitas calon gubernur yang diusung oleh koalisi yang terpecah. Partai Gerindra dan PKS mengusung Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno, dan Partai demokrat, PAN, PKB, dan PPP mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni untuk berkompetisi dalam Pilkada DKI Jakarta. Mata Najwa kemudian mengundang Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono secara terpisah dalam dua episode berbeda. Keduanya diundang sebagai bahan Mata Najwa mewacanakan bahwa kualitas kedua orang tersebut akan sebanding dengan bentuk dukungan partai politik pengusungnya.

Pada 5 Oktober 2016, Najwa mengundang Anies Rasyid Baswedan yang merupakan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta yang didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terdapat beberapa fakta yang diangkat untuk menekankan bahwa ada kaitan antara dukungan partai politik dengan kualitas gubernur nantinya. Dimulai dengan ungkapan bahwa Anies secara tiba-tiba diusung oleh Gerindra dan PKS untuk maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemudian banyak juga pengguliran teks yang memperlihatkan kualitas rendah dari seorang Anies Rasyid Baswedan.

**Tabel 3.6**  
**Kesan ‘Tiba-Tiba’ disematkan Najwa kepada Pencalonan Anies Baswedan Debgai Bacagub DKI oleh Gerindra dan PKS**

Waktu	Visual	Teks
<p><b>Segmen 1</b></p> <p>01:31-01:50</p>		<p><b>Najwa Shihab</b>  <i>(Line 2)</i> Namanya tiba-tiba muncul dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Bukan kader parpol, namun ia dijagokan menjadi penantang terkuat. Kejutan tidak sampai di situ, ia dipinang dan bersedia untuk maju dalam Pilgub DKI dari partai yang menjadi lawan politiknya dalam pemilihan presiden 2014 lalu.</p>
<p>01:52-02:27</p>		<p><b>VT Deklarasi Anies oleh Prabowo</b>  <i>(Line 3)</i> Kami, setelah proses rembuk yang cukup panjang, menetapkan, mencalonkan saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota.</p>
<p>02:28-02:40</p>		<p><b>Najwa Shihab (Host)</b>  <i>(Line 4)</i> Ya, dan sudah hadir di meja Mata Najwa, Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat malam Mas Anies [Anies: Selamat malam] Terima</p>



<p>02:41- 03:42</p>	 <p>The image is a screenshot from a television broadcast. It shows a man with glasses, identified as Anies Baswedan, sitting at a desk and speaking. He is wearing a light blue button-down shirt. The background is a blue studio set with some circular patterns. At the bottom of the frame, there is a news ticker with the following text: 'ANIES BASWEDAN', 'SARAL CALON GUBERNUR DKI JAKARTA', 'MATA NAJWA', 'LIVE', 'METRO TV', and '70.00 NO DI KATE TAK WAJIB • OTORITAS AS BERSIAP HADAPI BAHU'.</p>	<p>kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ketika anda maju banyak yang terkejut. Terutama terkejutnya Mas Anies, tidak sampai 2 bulan sejak direshuffle, tiba-tiba siap maju untuk jabatan yang baru. Suara yang muncul kemudian seperti ini, ‘memang Anies Baswedan itu ambisius, memang hanya mengejar jabatan’. Anda mendengar suara itu, bagaimana? [Anies: Jadi betul saya selesai di bulan Juli, tapi saya pun tidak mengira bahwa saya akan dicukupkan tugasnya di kabinet. Jadi kita membayangkan program itu berjalan 5 tahun, setelah 2 tahun dicukupkan, sesudah itu saya kembali ke dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan yang saya kerjakan dulu. Saya banyak hadir di berbagai daerah dengan berbagai macam acara. Hidup saya mengalir, dan suatu saat, sekitar akhir Agustus awal September, saya diundang untuk ditanya apakah bersedia untuk dicalonkan.]</p>
-------------------------	---	--

Pada episode Merayu Jakarta, Najwa menekankan bahwa Koalisi Gerindra- PKS memberi dukungan yang instan, tiba-tiba dan buru-buru kepada Anies Rasyid Baswedan. Ditayangkan pernyataan Prabowo Subianto bahwa keputusan pengusungan Anies-Sandiaga merupakan hasil dari proses berembuk yang cukup panjang. Secara cerdas Najwa menggali detil bahwa proses pencalonan sebenarnya hanya berlangsung kira-kira hampir satu bulan. Terlihat dari pengakuan Anies saat Najwa menanyakan kesan tiba-tiba dicalonkan setelah tidak sampai dua bulan ia direshuffle sebagai Menteri Pendidikan RI. Anies mengatakan ‘sekitar akhir Agustus awal September, saya diundang untuk ditanya apakah bersedia untuk dicalonkan’. Pengakuan ini membuktikan bahwa dukungan Gerindra dan PKS adalah dukungan yang datang secara tiba-tiba.

Najwa menggunakan kalimat ‘bukan kader parpol’ untuk melabeli Anies Baswedan. Padahal secara sadar Najwa Shihab percaya bahwa partai politik harus mengedepankan sosok yang memiliki kesamaan ideologis untuk maju menjadi pemimpin di suatu daerah. Tentu Anies Baswedan yang bukan kader dari kedua partai pengusungnya yakni PKS dan Gerindra tidak terjamin memiliki kesamaan ideologi dengan kedua partai tersebut. Terlihat Najwa Shihab mendelegitimasi bentuk dukungan Gerindra dan PKS kepada Anies dengan mengatakan bahwa dukungan mereka tidak sinkron dengan ideologi partai namun disinyalir ada deal-deal tertentu. Dukungan Gerindra dan PKS kepada Anies yang bukan kader partai juga memperkuat wacana bahwa ‘Dukungan Partai Politik sebagai Representasi Kualitas Gubernur’. Ketika bentuk dukungannya mendadak, buru-buru, dan terlihat tidak tepat, akhirnya kualitas sosok yang akan menjadi gubernur tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, dikarenakan masih tidak jelasnya kesamaan ideologi dengan pengusungnya.

Bertujuan memperlihatkan sosok Agus Harimurti Yudhoyono kepada publik sebagai kandidat gubernur yang mendapat dukungan dari koalisi Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP yang berpisah dari Gerindra dan PKS, Mata Najwa mengundangnya di episode Bertaruh di Jakarta. Dalam episode ini, Najwa ingin menampakkan bahwa sosok Agus tidak memiliki kualitas baik untuk menjadi gubernur dan Mata Najwa ingin membuktikan bahwa dukungan dadakan yang diberikan oleh partai pengusungnya merupakan dukungan yang lemah sehingga berakhir pada sosok Agus yang belum matang.

**Tabel 3.7**  
**Najwa Menggambarkan Dukungan Partai Politik Pengusung Agus kepadanya**

Waktu	Teks
<b>Segmen 1</b>  10:20- 10:56	<b>Najwa Shihab</b> <i>(Line 19)</i> Karena berbeda dari informasi yang berhasil kami kumpulkan Mas Agus. “Hanya terkesan tiba-tiba tapi penggodokan nama Agus sudah dilakukan sejak tiga minggu sebelum tanggal 23 September.” “Ada catatan Wakil Sekjen PPP, Arwani Tomafi, nama Agus dimunculkan oleh Partai Demokrat.” “Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan nama Agus sudah disimulasikan dengan berbagai tokoh sejak 3 atau 4 minggu sebelum pertemuan di Cikeas.” “Ada Fungsiaris Partai Demokrat Didi Mukrianto, suara-suara dari kalangan internal partai nama yang dipertimbangkan putra Agus Harimurti Yudhoyono.” Ini semuanya 3 minggu. “Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan, sejak 2 bulan lalu nama Agus masuk di survei.” Ini bukan tiba-tiba Mas Agus.
10:57- 11:15	<b>Agus Harimurti Yudhoyono</b> <i>(Line 20)</i> Saya, bagi saya itu tiba-tiba. Karena saya sama sekali tidak pernah diajak ngomong, diajak ngobrol tentang hal itu. Sehingga saya tidak tahu [Najwa potong: Jadi yang mempersiapkan orang tua saja dan tim partai yang lain?] Oh saya tidak mengatakan seperti itu. Dan saya yang jelas, versi saya adalah ketika itu saya sedang ada di Darwin dan saya kembali karena untuk mengetahui secara langsung.

Najwa Shihab mewacanakan dukungan Partai Koalisi Kekeluargaan sebagai dukungan yang terksesan tiba-tiba. Namun, dari apa yang disebutkan Najwa yakni penggodokan nama agus hanya dalam jangka waktu 3 minggu hingga 2 bulan, tetap saja itu menunjukkan jangka waktu yang singkat dalam pemberian dukungan oleh partai untuk mengusung pemimpin daerah sekelas Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono mengamini bahwa dukungan yang ia terima merupakan dukungan yang tiba-tiba. Ia mengaku saat diberitahu akan didukung sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, saat itu Agus sedang melatih prajuritnya di Darwin, Australia, dan ia sama sekali tidak mengetahui perihal pencalonan dirinya.

Dalam tiga episode Mata Najwa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, Najwa Shihab ingin menggambarkan betapa sosok yang dapat menjadi gubernur ideal bagi Jakarta dapat diidentifikasi melalui bagaimana dukungan partai yang melatarbelakangi sosok tersebut. Lebih dalam lagi Najwa Shihab memperlihatkan bahwa dukungan ini tidak hanya dari segi jumlah, namun juga soliditas yang diperlihatkan dari persatuan dan kesigapan partai politik dalam mengeluarkan dukungan. Secara tersirat Najwa menggambarkan bahwa masing-masing calon merupakan representasi dari dukungan partai politiknya. Digambarkan kesiapan dan kesigapan Koalisi PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar merupakan soliditas dan bukti dari kuatnya dukungan mereka. Adapun pecahan Koalisi Kekeluargaan yakni Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP serta Gerindra dan PKS, merupakan dua kubu yang baru resmi terpecah dalam dua hari (21-23 September 2016) sehingga dukungan dari partai-partai politik tersebut merupakan dukungan yang lemah, instan, dan tidak solid.

Najwa Shihab saat berbincang bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia, sempat menyinggung pandangannya terkait partai politik.

“Jadi memang ada anomali sih. Di satu sisi kita, butuh yang terbaik, di sisi lain pilihannya tidak banyak karena memang pintu untuk itu juga dikuasai oleh sekelompok, sekelompok orang yang punya kepentingan tertentu, dalam hal ini partai politik, yang boleh mencalonkan pemimpin.” (Najwa Shihab, 2016)

Meski menyinggung bahwa partai politik rentan akan kepentingan, Najwa sadar bahwa partai politik merupakan harapan bangsa Indonesia ketika hendak mencari pemimpin dimana hanya partai politiklah yang berkemampuan dan besar kesempatannya untuk mencalonkan pemimpin. Kognisi Najwa tersebut

dipaparkan bahwa partai politik yang bertele-tele dalam mengusung kandidat, sarat akan kepentingan dan deal-deal politik tertentu. Dimana ia mewacanakan hal tersebut sebagai bentuk dukungan yang tidak tulus dan menjadikan permasalahan deal ini sebagai pertanyaan kala mewawancarai Anies di episode Merayu Jakarta.

Berkaitan dengan kognisi Najwa, sejatinya di Indonesia, koalisi partai politik merupakan fenomena demokrasi yang senantiasa mendapatkan perhatian publik. Pentingnya koalisi dilakukan karena dengan saling bersatu, partai politik semakin kuat dalam mengambil simpati masyarakat. Seringkali masyarakat melihat partai politik sebagai organisasi yang saling menyatukan ideologi untuk mengusung kandidat pemimpin yang berkualitas bagi masyarakat. Oleh karenanya ketika muncul koalisi partai politik dengan kesamaan ideologi, masyarakat tidak akan bingung melihat kekuatan dan perjuangan partai tersebut (Firmanzah, 2011: 377). Mata Najwa menampakkan bahwa semangat persatuan menjunjung tinggi kebhinekaan merupakan bentuk soliditas dan kekuatan yang ada pada Koalisi PDI-P dan kawan-kawan. Sehingga kekuatan tersebut berimbas pada dukungan yang murni dengan tujuan jangka panjang yang jelas. Sedangkan koalisi yang lain diperlihatkan sedang pecah dan tidak berkekuatan.

Koalisi PDI-P yang memiliki suara terbanyak di Jakarta, solid dengan partai koalisinya, dan cepat tanggap menentukan kandidat menjadikannya memiliki dukungan yang baik kepada Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sosok Basuki Tjahaja Purnama, dengan dukungan yang solid itu, semakin memperlihatkan bahwa ia merupakan sosok yang berkualitas. Sebagai petahana mayoritas masyarakat Jakarta masih puas akan hasil kerjanya. Hasil survei Saiful

Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 1-9 Oktober 2016 memperlihatkan bahwasannya 75% masyarakat sangat puas terhadap kinerja Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Lebih detil lagi, masyarakat puas atas kerja nyata gubernurnya di bidang sarana dan prasarana. Sebanyak 92% masyarakat puas dengan kondisi rumah sakit/puskesmas, 90% puas dengan kualitas pelayanan di kelurahan/kecamatan, terhadap kualitas gedung sekolah 90% dan air bersih 89% (Ahmad, 2016).

Apa yang terlihat dari teks Mata Najwa episode Petarung Ibu Kota terkait wacana “Dukungan Partai Politik sebagai Representasi Kualitas Gubernur” adalah koalisi partai yang beradu kekuatan dan kesiapan dalam mendukung kandidat masing-masing. Di satu sisi terdapat Koalisi Kekeluargaan yang nyatanya tidak dapat menjaga keutuhan partai politik anggotanya, di sisi lain terbentuk pula koalisi partai yang mengandalkan PDI-P sebagai kepalanya atas dasar besarnya jumlah kursi pada ranah parlemen. Tergambar jelas bahwa koalisi yang ricuh tidak akan semudah membalikkan telapak tangan untuk mengusung/menciptakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang berkualitas baik. Dan sebaliknya, koalisi partai yang siap dan solid dalam mendukung pasangannya, tentu dapat pula menjadikan pasangan yang diusung sebagai gubernur dan wakil gubernur yang berkualitas untuk DKI Jakarta.

Selain melalui jalur perseorangan, dukungan partai politik merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki pasangan calon pemimpin daerah untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Konteksnya di

Indonesia, untuk mencalonkan seseorang sebagai pemimpin daerah, partai politik harus mematuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”. Menjadi suatu kekuatan bilamana ada koalisi partai politik yang melebihi dari ketentuan UU tersebut mengusung satu sosok yang sama. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan jumlah 20% kursi di parlemen tidaklah mudah, dan itu merupakan representasi dari kepercayaan publik kepada partai politik. Sehingga dengan demikian, di Indonesia, sosok yang didukung partai politik yang memiliki suara besar, dan solid merupakan representasi dari keinginan masyarakat.

Menurut Jatmika (2014: 175), memiliki kendaraan partai yang besar secara jumlah bukan jaminan memenangkan pemilu. Namun tidak memiliki partai politik yang memadai akan jauh lebih sulit memenangkan pemilu. Senada dengan pendapat tersebut, Najwa Shihab melalui Mata Najwa menampakkan bahwa dukungan partai politik yang solid merupakan bukti atau jaminan bahwa sosok yang didukung adalah sosok yang berkompeten dan akan mudah untuk menjadi gubernur. Hal ini diwacanakan dengan mengambil contoh PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama yang terkenal bersih dari korupsi, jujur, dan tegas. Penetrasi nilai yang dilakukan Mata Najwa ini tidak terlepas dari konteks bahwasannya Nasdem sebagai salah satu partai

pengusung Ahok diketuai oleh pemilik Metro TV, televisi yang menjadi induk di mana Mata Najwa berkembang.

Dengan begini anggapan bahwa dukungan partai politik sebagai representasi kualitas gubernur diwacanakan dengan memperlihatkan proses demokrasi yang cepat, lugas dan tidak bertele-tele di mana itu dilakukan oleh Nasdem, PDI-P, Hanura, dan Golkar untuk mendukung Ahok. Masyarakat pada akhirnya mengamini bahwa dukungan partai tidak semata-mata berisi deal politik tapi juga dukungan yang menjunjung kualitas yang diinginkan publik, dalam kasus ini, sosok Basuki Tjahaja Purnama. Memperlihatkan kesan sebaliknya, sesudah mengulik bahwasannya Koalisi Kekeluargaan terpecah dan mengusung calon masing-masing, Mata Najwa menggambarkan bahwa calon tersebut yakni Anies dan Agus, tidak berkapasitas sebagai gubernur. Anies digambarkan sebagai sosok yang ambisius mengejar jabatan dan gagal sebagai menteri. Agus H Yudhoyono diperlihatkan sebagai sosok mentah yang belum pernah memimpin di pemerintahan. Keduanya dijadikan elemen pembentuk wacana bahwa dukungan partai politik yang tidak kuat, tidak solid hanya akan menghasilkan sosok gubernur yang tidak berkualitas baik.

## **B. Gubernur Ideal didasari oleh Platform dan Rekam Jejak yang Baik**

Tema besar dari tiga episode Mata Najwa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 ini adalah bagaimana sosok kandidat yang ingin menjadi pemimpin Jakarta. Najwa Shihab mengulik rekam jejak dan platform dari dua orang kandidat baru dan menyandingkannya dengan petahana. Dari segala pembahasan dan tayangan yang ada, Najwa Shihab ingin membenamkan pada publik bahwa memilih



gubernur harus dengan nalar, haruslah berdasar logika karena gubernur ideal adalah ia yang dilihat dari visi dan misi. Dalam transkrip ketiga episode tersebut, terdapat pembahasan yang menyiratkan sisi negatif dan positif kandidat tertentu sebagai representasi dari rekam jejak dan platform mereka yang mana berujung secara tidak langsung agar masyarakat merumuskan apakah mereka adalah orang yang bisa menjadi gubernur ideal bagi Jakarta.

“Jakarta butuh gubernur yang ideal, lebih butuh lagi pemilih yang rasional. Gubernur yang hatinya untuk rakyat, terpilih karena aspirasi & kritik rakyat yang kuat. Laku seorang gubernur kepada warga, cerminan tentang mutu pemilihnya. Pemilik kota Jakarta adalah warganya, gubernurnya hanya pelayan mereka. Kita tak memilih yang pasti menang, melainkan yang akan mewujudkan aspirasi kita dengan senang. Tak ada gubernur yang akan memuaskan kita semua, pasanglah telinga saat ada protes dari mereka yang berbeda. Demokrasi sudah seharusnya berisik, itulah mengapa gubernur dipilih melalui proses politik. Jakarta harus jadi platform akal sehat, memilih mengedepankan platform dan rekam jejak.” (Najwa Shihab)

Kutipan di atas adalah pernyataan Najwa tentang kriteria gubernur yang ideal. Ia mengatakan bahwa seorang gubernur hendaknya terpilih atas dasar aspirasi dan kritik rakyatnya. Najwa juga menghimbau bahwa tidak ada sosok yang dapat memuaskan semua pihak, akan tetapi hendaknya masyarakat jeli dalam memilih dengan mengedepankan platform dan rekam jejak sang kandidat.

**Tabel 3.8**  
**Najwa Mewacanakan Kriteria yang Dimiliki Bila Ingin Menjadi Gubernur Jakarta dalam Bentuk Pertanyaan Kepada Agus**

Waktu	Teks
<b>Segmen 2</b>  02:31	<i>(line 33)</i> Najwa: Berarti kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang lebih baik. Em, biasanya orang kalau memilih calon pemimpin itu ada beberapa hal. Salah satunya rekam jejak. Dan itulah demikian yang saya ingin anda juga bercerita ke publik karena banyak yang belum tahu nih rekam jejak Agus. Misalnya Mas Agus, keputusan terbesar yang pernah anda ambil yang kemudian memiliki dampak ke publik.

	<p>Bisa ceritakan ke kami? [Agus: Ya ini, keputusan terakhir ini, saya pikir..] Itukan keputusan yang anda ambil pribadi. Maksud saya keputusan yang anda ambil yang kemudian membawa dampak ke publik [Agus: Keputusan dalam..?] Kapasitas anda selama, selama ini [Agus: Oh. Saya pikir banyak keputusan yang saya ambil, tentu dalam konteks di dalam perjalanan karir saya sebagai perwira militer.] Apa misalnya mas? [Agus: Ya banyak sekali saya tidak bisa menjelaskan] Satu saja kalau banyak [Urusan TNI itu urusan negara, kadang-kadang tidak bisa dijelaskan di ruang publik, begitu.]</p> <p>(Line 34) Yang bisa dijelaskan? Karena kan kemudian orang menilai rekam jejak nih, Mas Agus. Katakanlah Gubernur DKI, petahana, Keputusannya beradampak ke 10 juta sekian penduduk DKI. Calon yang lain, bakal calon yang lain, Mas Anies ketika menjadi menteri keputusannya berdampak ke sekian orang. Kalau kemudian, keputusan besar yang pernah anda ambil?</p> <p>(Line 35) Oke berarti kalau kemudian saya tanya berapa besar anggaran yang pernah dikelola, juga anda akan menjawab yang sama, itu tidak relevan? [Ya, tidak relevan menurut saya, tidak relevan] Tidak relevan? [Tidak relevan] Tapi berapa banyak sih Mas Agus? Pernah tidak mengelola anggaran dalam jumlah yang besar? [Ya sekali lagi anggaran itu tentu dalam hubungan TNI ya, itu sudah ditentukan setiap batalyon itu berkisar hampir sama di seluruh batalyon, begitu, tidak bisa saya jelaskan di sini ya.] Berarti tidak bisa dibandingkan dengan DKI, 67 Triliun, kemudian itu, sangat jauh ya. [Oh ya dong.] Jadi rekam jejaknya tidak bisa apple to apple [tidak apple to apple]</p> <p>(Line 36) Berarti satu lagi, kalau tadi anda banyak bercerita batalyon, itu, berarti berapa banyak staf yang pernah dipimpin Mas Agus? [Agus: Tch heheh. Saya tahu arahnya adalah apakah saya mampu untuk menghadapi ini semua. Langsung nanya gitu aja mbak, hahaha, ya kan? Muter-muter dia, hahaha. Muter muter muter] yang saya tanya rekam jejak berdasarkan itu.</p>
03:31	
04:29	
05:02	


Najwa Shihab di dalam pertanyaannya kepada Agus Harimurti Yudhoyono dalam episode Bertaruh di Jakarta menyelipkan wacana gubernur ideal adalah yang memiliki kemampuan di bidang penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan, bahkan hingga ke detil pengelolaan anggaran. Hal tersebut merupakan spesifikasi dari rekam jejak yang selalu menjadi andalan Najwa saat mengatakan

kriteria gubernur yang baik. Najwa, mengetahui bahwa Agus minim pengalaman di bidang pemerintahan namun tetap menanyakan pengalaman yang ia miliki terkait pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan SDM. Secara implisit bahwa kriteria gubernur ideal untuk Jakarta tidak dimiliki oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Di sini Najwa ingin menanamkan nilai bahwa rekam jejak dan kerja nyata seseorang kandidat gubernur merupakan hal yang harus dijadikan pertimbangan pertama oleh masyarakat ketika hendak memilih sosok tersebut. Padahal apa yang harus dimiliki gubernur yang baik tidak hanya itu melainkan sosok pribadinya, karakteristik, dan sifatnya juga merupakan hal yang tidak kalah penting (Rosenthal, 2013: 56). Hal ini dapat dilihat dari bantahan Najwa disaat Agus menjawab bahwa *sincerity* dan *good will* juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih gubernur. Najwa membantah bahwa menilai *sincerity* dan *good will* tentu dilihat dari rekam jejak. Semakin terlihat bahwa Najwa Shihab mengarahkan publik untuk benar-benar jeli hanya kepada kerja nyata seseorang dan pengalamannya dalam pemerintahanlah yang menjadi pertimbangan paling penting.

Selain rekam jejak di pemerintahan, Najwa juga menyelipkan teks yang memperlihatkan bentuk rekam jejak di bidang integritas selama berkarya. Mata Najwa menayangkan pernyataan Ahok yang mengemukakan bahwa dirinya bersih dan tidak dengan Sandiaga Uno yang mengikuti amnesti pajak.

**Tabel 3.9**  
**Tayangan Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan bahwa Sandiaga Uno sebagai pengemplang pajak**

Waktu	Visual	Teks
Segmen 4  00:12		<p>“Undang-undang pembuktian terbalik itukan hasil ratifikasi konvensi PBB lawan korupsi. Pak Sandi kan salah satu ketua DPP partai, ya tolong diperjuangkan supaya bisa lurus. Nah Pak Sandi nantang saya tuh nggak apel ke apel, tau nggak, nggak kayak buah apel ditantang buah apel. Jadi di dalam pembuktian terbalik itu buat pejabat, itu di situ ada laporan LHKPN. Makanya KPK periksa saya, uang dari mana, dari mana sejak tahun 99. Nah saya udah teruji. Nah kalau buat yang bukan pejabat, itu di laporan pajaknya. Makanya untuk peja, untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang tidak dia bayar dengan gaya hidupnya, di situlah pemerintah mengeluarkan tax amnesti. Dan dalam hal ini Pak Sandiaga ikut, berarti ini udah membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, nggak bayar pajak, gitu loh, gitu ya.”</p>

Sebagai calon gubernur, seseorang pasti diteliti dari mana hartanya didapat. Bila ia merupakan seorang penyelenggara negara, maka ia harus membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Dalam tataran teks, Mata Najwa menjadikan fenomena ini sebagai sebuah penggambaran yang jitu untuk menampakkan contoh rekam jejak yang negatif dimana ini disematkan oleh satu kandidat gubernur ke kandidat yang lain. Salah satu bentuk rekam jejak negatif yang tidak patut ada dalam sosok gubernur adalah terkait sumber kekayaan yang ia miliki. Najwa, dengan menayangkan pernyataan Ahok di atas, ingin menyampaikan bahwa sosok yang layak menjadi pemimpin di

daerah adalah orang yang terbukti bersih dari praktik korupsi dan kasus keuangan lain yang berpotensi pada praktik KKN.

Dalam teks pada episode menjelang Pilkada DKI Jakarta ini, Najwa Shihab memfokuskan kriteria gubernur ideal hanya platform dan rekam jejak saja. Padahal selain itu, ia sadar bahwa ada kriteria penting yang harus menjadi pertimbangan, yakni karakteristik seseorang. Dalam wawancaranya bersama Cosmopolitan FM, Najwa Shihab menuturkan bahwa karakter juga perlu dilihat dalam sosok seseorang apakah ia pantas atau tidak menjadi gubernur.

“Ada tiga hal yang selalu jadi patokan. Rekam jejak, karakter, sama program. Jadi, rekam jejak, apa sih yang selama ini sudah dia lakukan.”  
(Najwa Shihab, 2017)


Akan tetapi, pada tataran wacana yang ia gulirkan, karakter seseorang dianggap tidak terlalu penting apabila platform dan rekam jejaknya terbilang buruk. Najwa ingin meyakinkan masyarakat bahwa niat baik, kemampuan memimpin, dan prestasi di luar pemerintahan saja tidak mungkin dapat menjalankan pemerintahan dengan baik apabila seseorang tersebut tidak pernah sama sekali berkecimpung di dalamnya.

Berkaitan dengan platform, Najwa Shihab menekankan bahwasannya ia harus sesuatu yang nyata dan tidak sebatas janji. Platform menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana kerja atau program, yang mana dalam aspek kepemimpinan daerah adalah rencana kerja yang akan dilakukan selama menjadi gubernur demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Najwa Shihab menggambarkan platform sebagai hal yang garis lurus dan harus berjalan beriringan dengan rekam jejak seseorang dan juga kapabilitasnya. Gubernur ideal, menurut Najwa adalah

seseorang yang punya platform yang baik dan jelas serta paham bagaimana akan menjalankannya.

Jelang Pilkada DKI Jakarta ini, Najwa Shihab memperlihatkan contoh buruk platform dengan menggulirkan pertanyaan kepada Agus Harimurti Yudhoyono yang seperti menguji visi, misi, dan programnya. Selain itu, wacana gubernur ideal didasari platform dan rekam jejak yang baik juga diperkuat dengan menyajikan kepada masyarakat bukti bahwa Ahok telah melakukan eksekusi program-program dari gubernur terdahulu.

**Tabel 3.10**  
**Basuki Tjahaja Purnama Sebut Dirinya Mengeksekusi Program- Sungai Bersih Jakarta**

Waktu	Visual	Teks
<p>Segmen 3</p> <p>06:06</p>		<p>Sebetulnya program JEDI itu, normalisasi sungai itu dari jaman Bang Yos. Kalau bicara tanda tangannya di zaman Pak Foke. Sama kayak MRT, semuanya di zaman mereka. Nah, tapi siapa yang eksekusi? Itu yang Pak Jokowi sama saya sampaikan. Jakarta tuh nggak butuh program, nggak butuh teori-teori. Kita harus eksekusi, harus ada tindakan nyata. Lalu Pak Anies juga mungkin karena dia bukan petahana, dia nggak ngerti bahwa bersihkan sungai, jaga sungai bersih dengan program JEDI ini nggak ada hubungan sebetulnya. Program sungai bersih karena kita bentuk PPSU, UPK Badan Air. Tungguin, saya bikin sistem. Semua sungai, perjarak, kita gunakan smart city, saya tahu persis sungai ini kalau kotor siapa yang tanggung jawab</p>

Tayangan di atas diputar oleh Najwa sebagai bahan balasan untuk pernyataan Anies Baswedan bahwasannya sungai bersih bukan karena Ahok melainkan karena hasil kerja Foke saat menjabat dulu. Pemutaran tayangan tersebut

sekaligus membuktikan kualitas dari gubernur yang baik adalah saat ia berhasil mengeksekusi program sehingga nyata hasilnya tidak hanya sebagai rencana semata. Konteksnya pada waktu itu mayoritas masyarakat sepakat bahwa Indonesia menginginkan pemimpin-pemimpin yang tidak Cuma bisa pencitraan tapi harus dapat melakukan kerja nyata.

Adapun teks yang memperlihatkan bahwa Najwa sangat keras menajamkan bahwa platform merupakan hal yang penting untuk dikritisi adalah saat Najwa berulang kali mencecar jawaban Agus yang tidak memuaskannya dalam episode Bertaruh di Jakarta.

*(Line 48)* Baik, **kita akan lihat Program Aksi seperti ini, yang utama “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana transportasi publik yang terpadu dan andal”. Ini Program Aksi mas, Aksinya di mana?** [Agus: Kenapa?] **Aksinya, spesifikasinya aksinya akan seperti apa kalau meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi?** [Ya, kita lihat bahwa memang penduduk Jakarta ini kan makin lama makin bertambah. Kita tidak bisa mencegah terjadinya urbanisasi begitu saja. Tetapi perlu kita semakin revitalisasi sarana dan prasarana transportasi kita, ya. Apa yang sudah ada kita perkuat, kita berdayakan. Tetapi juga kita tahu bahwa jumlahnya pun mungkin masih kurang untuk bisa mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat Jakarta. Nah inilah yang nanti akan kita perkuat. Terutama juga bagaimana menciptakan..]

*(Line 49)* **Apa misalnya mas? Jadi menambah, kongkretnya menambah apa misalnya?** [Ya transportation hub juga harus diperkuat sehingga waktu tempuh seseorang menuju ke lokasi pekerjaan itu semakin berkurang. Saat ini rata-rata penduduk menghabiskan sampai, hampir ke, bisa mencapai 30% dari pendapatan atau penghasilannya untuk transportasi. Dan juga sangat berpengaruh terhadap waktu yang terbuang di dalam perjalanan. Tentu ini kita berupaya untuk menurunkan waktu tempuh tersebut dan akhirnya menjadi lebih produktif] **Dengan cara?** [ya menambah jumlah transportasi umum, meningkatkan kualitasnya, ya kan. Kemudian kemudahan, aksesnya diperbanyak ke semua tempat, dan juga lebih ramah untuk kaum yang disable dan tentunya itu semua dalam sebuah konsep yang terintegrasi dengan tata ruang yang ada di Jakarta.]

*(Line 51)* Oke. Kalau soal ini mas? Karena kan ini sesungguhnya sudah dipublish oleh KPU karenanya kemudian kami memperoleh ini. Soal

bagaimana program aksi meningkatkan kualitas normalisasi bantaran saluran sungai waduk dan situ. **Adakah rencana spesifik yang akan dijalankan?** [Agus: Sama seperti jawaban saya di awal tadi, nanti pada saat masa kampanye, kita bersabar dulu, saya akan bisa menjelaskan secara lebih terelaborasi, begitu.]

Terkait platform sebagai indikator gubernur ideal, Najwa Shihab menampakan bahwa platform yang baik adalah platform yang detil hingga ke tahap eksekusi dan efektifitas. Dari cara Najwa mencecar Agus atas program-programnya yang telah didaftarkan ke KPU, yakni dengan kalimat “*Aksinya, spesifikasinya aksinya akan seperti apa?*”, “*Konkretnya menambah apa, misalnya?*”, “*Adakah rencana spesifik yang akan dijalankan?*” ia ingin memperlihatkan bahwa platform dari gubernur ideal adalah platform yang konkret dan spesifik. Dengan ini masyarakat akhirnya terbuka bahwa bentuk platform itu harus bisa diaplikasikan dengan nyata dan berimbang kepada mereka dan gubernur yang ideal adalah gubernur yang dapat melakukannya.

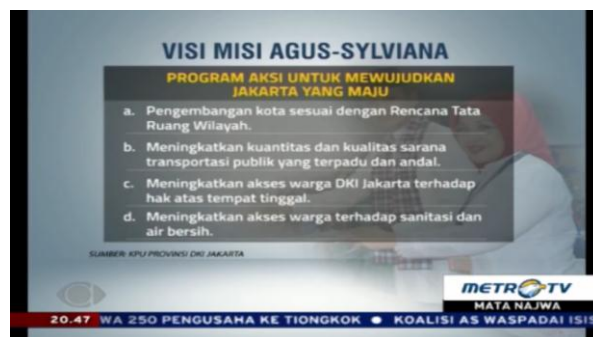
“Misalnya program dan janji, itu kita harus ukur. Apakah program dan janji realistis dengan rekam jejaknya. Misal *gue* mau jadi ini, tapi apa sih yang udah *lu* lakukan sehingga *lu* bisa, nanti bisa jelas, *lu* bisa melaksanakan itu. Jadi bukan hanya janji yang diucapkan, tapi juga realisasinya dan apa yang udah *lu* perbuat sebelumnya” (Najwa Shihab, 2017)

Kutipan di atas merupakan pemikiran Najwa Shihab yang ia utarakan saat ditanya mengenai kriteria gubernur ideal dalam hal program kerja, pada saat on air dalam acara Happy Hour di Cosmopolitan FM. Jelas sekali bahwa Najwa menganggap rekam jejak sebagai hal yang memiliki keterkaitan mutlak dengan realisasi program kerja. Keduanya merupakan kriteria utama yang harus bagus apabila ingin menjadi gubernur ideal. Apa yang dipikirkannya tertuang secara implisit dalam Mata Najwa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Najwa



menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang mengulik kesiapan kandidat terkait program kerjanya untuk melihat seberapa jauh program tersebut dapat direalisasikan. Contoh saat Najwa dalam episode Bertaruh di Jakarta menanyakan kepada Agus bagaimana detail dari program revitalisasi sungai bersih yang ia miliki, ia sejatinya tengah menguji Agus yang rekam jejaknya dinilai belum dapat mengakomodasi program aksi tersebut.

**Gambar 3.1**  
**Platform dari Agus H Y dalam Bentuk Program Aksi yang Dicecar oleh Najwa**



*Sumber: youtube.com; Mata Najwa eps Bertaruh di Jakarta*

Bagi Najwa, platform yang baik adalah ia yang dapat diimplementasikan dan berimbas baik pula bagi masyarakat luas dan juga harus keluar dari pribadi yang terbukti pernah melaksanakan hal yang mirip atau mendekati dengan platform tersebut. Berdasarkan kognisi tersebut, ketika platform seseorang terlihat bagus dan meyakinkan, perlu ada kroscek kesinambungan antara rekam jejak dan platform yang ia miliki. Pada Mata Najwa menjelang Pilkada DKI Jakarta, diperlihatkan contoh platform yang baik dari Agus Harimurti Yudhoyono, setidaknya terlihat baik oleh Najwa, dan kemudian digulirkan kroscknya sehingga memperlihatkan apakah itu merupakan platform baik yang diikuti rekam jejak yang baik pula dari seorang Agus atau malah sebaliknya.

Dari cara Mata Najwa merepresentasikan gubernur ideal yakni sosok yang rekam jejak dan platformnya baik dan berkualitas, peneliti menemukan pola bahwa hal tersebut merujuk kepada sosok Basuki Tjahaja Purnama. Dalam tataran teks Najwa membandingkan rekam jejak Agus dengan Ahok yang terbukti sudah memimpin Jakarta, Najwa juga menayangkan tayangan-tayangan bantahan Ahok yang membalas tuduhan negatif dari lawan politiknya dengan memaparkan rekam jejaknya baik dari sisi integritas dan kapabilitasnya. Apa yang disampaikan Najwa tidak terlepas dari konteks sosial bahwa masyarakat Jakarta merasa puas terhadap kinerja Ahok selama ini. SMRC merilis survei yang dilakukan pada 1-9 Oktober 2016 yang mana 75% masyarakat sangat puas dengan kinerja Ahok. Berikut kutipan dari rilis SMRC terkait survei tersebut

“Langkah-langkah Ahok membenahi Jakarta juga diapresiasi warga. Sekitar 70% persen warga menyatakan puas dengan kinerja Pemda DKI menangani banjir, 79% puas dengan kinerja Pemda DKI menangani sampah, dan 51% menyatakan yakin bahwa program bea siswa bagi keluarga miskin berjalan dengan baik. Yang masih rendah adalah dalam hal kinerja pemerintah menangani kemacetan. Hanya 22% warga yang menyatakan puas dengan kinerja Pemda DKI menangani kemacetan. Masyarakat menyatakan bahwa empat sifat kepemimpinan yang paling penting dimiliki seorang Gubernur DKI adalah: jujur, bisa dipercaya dan bersih dari korupsi (44,7%), mampu memimpin (17,2%), perhatian pada rakyat (16,2%) serta tegas dan berwibawa (14,5%).” (Ahmad, 2016)

Hal penting yang berhasil ditangkap dari survei di atas adalah bahwa dalam konteks sosial masyarakat, hal yang dianggap penting dan membuat masyarakat puas dari seorang gubernur adalah kerja nyata yang menghasilkan program bermanfaat, integritas, dan karakteristik pribadinya. Semua hal ini masih berujung pada sosok Basuki Tjahaja Purnama, tak pelak Mata Najwa kembali menajamkan

bahwa gubernur ideal adalah ia yang baik secara platform dan rekam jejaknya, secara implisit ia adalah Basuki Tjahaja Purnama.

Dilihat dari segi praktik media, pengguliran wacana gubernur ideal dalam episode-episode Mata Najwa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 ini sejatinya tidak terlepas dari aspek kuasa Metro TV terhadap khalayak. Mata Najwa sebagai kepanjangan tangan Metro TV dan Surya Paloh, ingin mendominasi pikiran masyarakat agar realitas yang mereka ciptakan dianggap benar oleh masyarakat. Realitas tersebut yakni wacana gubernur ideal adalah sosok yang punya platform dan rekam jejak yang baik, yang mana digambarkan bahwa kriteria ini dimiliki oleh Basuki Tjahaja Purnama, kandidat yang juga diusung oleh Partai Nasdem, partai yang dikepalai Surya Paloh. Oleh karena

Keberpihakan semacam ini sudah lumrah terjadi di sistem penyiaran Indonesia belakangan ini. Penelitian berjudul *Kepemilikan Media dan Intervensi Siaran* yang diterbitkan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2 Media), menyimpulkan bahwa kepemilikan media menjadikan segelintir orang menyalahgunakan fungsi media (terutama televisi) demi kepentingannya atau golongannya saja. Salah satu kasusnya adalah bagaimana MNC Grup memfilter pemberitaan tentang Joko Widodo bahkan menyerangnya, agar citra Hary Tanoesoedibjo tidak terjun bebas di mata masyarakat pada masa Pemilu 2014 (Rianto, dkk., 2014: 142).

Kaitannya pada Mata Najwa adalah Metro TV merupakan instrumen kampanye Nasdem secara tidak langsung untuk mendongkrak popularitas kandidat yang diusungnya dan afiliasinya. Hal ini mempengaruhi Mata Najwa

dalam menggulirkan wacana gubernur ideal yakni berasal dari sosok yang platform dan rekam jejaknya baik. Jadi walau disinyalir berperangai yang kurang disukai seperti berkata kasar, sering mengumpat, dan atau memiliki keyakinan agama dengan masyarakatnya, sosok tersebut bisa menjadi gubernur ideal apabila platform dan rekam jejaknya baik.

Wacana tersebut diperkuat karena pada konteksnya saat itu tengah terjadi prahara kasus dugaan penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok sebagai pelakunya. Karena dugaan penistaan yang dilakukannya saat pidato di Kepulauan Seribu, Ahok saat itu digugat agar segera ditahan berdasarkan hukum yang berlaku. Kasus ini kemudian membuat tersebarluasnya kampanye hitam yang menyatakan bahwa sosok tidak seagama, sosok yang keras, tidak patut dipimpin dan tidak dapat dan tidak cocok menjadi pemimpin Jakarta. Hal ini membuat sosok Ahok menjadi jauh dari kata gubernur ideal bagi DKI Jakarta, oleh karenanya Mata Najwa sebagai media milik Surya Paloh yang juga memiliki Partai Nasdem menggulirkan wacana bahwa gubernur ideal adalah sosok yang platform dan rekam jejaknya dalam pemerintahan baik, tidak dilihat dari sisi etnis, ataupun terkait isu primordial saja.